



Analisis Pengaruh Deseentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah

Anisa Sanas

Universitas Negeri Medan

Mei Sarah Tobing

Universitas Negeri Medan

Tri Kurnia

Universitas Negeri Medan

Dwie Belcha Nanda

Universitas Negeri Medan

Putri Kemala Dewi

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jln. William Iskandar, Pasar V Medan Estate

Korespondensi penulis: anisasanasna@gmail.com

Abstrak. *The imlementation of regional autonomy in the District / City of Central Java is still not implemented optimally. Regional autonomy has the primary purpose of public services closer to the community. Development in Central Java region including behind because many areas areas in Java, which has a low level of GDP. The state of the education sector, the transportation sector, unemployment and poverty in the province of Central Java is a reflection of the real against the public policy of regional autonomy, and achievement of development results in the development process in Central Java depends on the management policy of the Government. Theory of Kuznets about curve inverted U-shaped this suggests that there are stages through which the growth process when the initial revenue growth has not been evenly distributed levels of income inequality, but at this stage - the next step will equitable income distribution and inequality is likely to be small. Kuznets argued the stages - stages in the development process areas for the presence of income inequality. The results in this research, using Recursive Models as well as the methods used PLS (Panel Least Square) method fixed Cross-sections, that economic growth there is a positive and significant impact on fiscal decentralization and fiscal decentralization also a positive and significant the inequality region.*

Keywords: *Autonomous Region, Fiscal Decentralization, Economic Growth, Income Inequality*

Abstrak. Implementasi otonomi daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah masih belum berjalan dilaksanakan secara optimal, Otonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pembangunan di wilayah Jawa Tengah termasuk tertinggal karena banyak daerah-daerah di dalamnya, Jawa yang memiliki tingkat PDB yang rendah, Keadaan sektor pendidikan, sektor transportasi, Pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah merupakan cerminan nyata terhadap perekonomian kebijakan publik otonomi daerah, dan pencapaian hasil pembangunan dalam pembangunan. Proses di Jawa Tengah tergantung pada kebijakan pengelolaan pemerintah. Teori Kuznets mengenai kurva terbelah U terbalik ini menunjukkan bahwa ada tahapan-tahapan yang dilalui dalam pertumbuhan pendapatan awal belum merata tingkat ketimpangan pendapatan, namun pada tahapan-tahapan dalam proses pembangunan daerah untuk keberadaannya ketimpangan pendapatan. Hasil dalam penelitian ini menggunakan Model Rekursif serta metode yang digunakan Metode PLS (Panel Least Squere) tetap Cross-Section, sehingga pertumbuhan ekonomi disana positif dan dampak signifikan terhadap desentralisasi fiskal, dan desentralisasi fiskal juga positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Kata Kunci: *Daerah Otonomi, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan*

PENDAHULUAN

Pada masa pemerintahan terpusat pemerintah daerah masih dipandang belum mampu untuk menentukan atau mengurus urusan yang ada pada daerah (Silver et al , 2001:346). Otonomi

daerah dan Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan sistem pemerintahan yang memberikan otonomi yang luas bagi daerah untuk mendekatkan pelayanan publik. Desentralisasi, demokratisasi dan globalisasi merupakan penataan ulang daerah yang diperlukan yaitu strategi, lingkungan kerja, manajemen, budaya dan sistem yang didukung dengan profesionalisme, pertanggung jawaban, prinsip – prinsip keadilan, partisipasi semua pihak, transparansi dan akuntabilitas. Pembagian kewenangan kepada daerah juga terdapat pembagian mengenai keuangan antar tingkatan pemerintahan yang dinamakan desentralisasi fiskal. Pembagian wewenang mengenai keuangan berdasarkan tugas – tugas yang dilaksanakan disebut dengan konsep “*money follow function*” (Bahl, 1998).

Periode tahun 1996 – 1998 merupakan periode sebelum pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, laju pertumbuhan sesudah otonomi daerah dibandingkan sebelum pelaksanaan otonomi daerah belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan. Penelitian yang telah disampaikan oleh Atsushi Limi (2005) dengan data periode 1997 – 2001 ditemukan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara pertumbuhan per kapita dan desentralisasi fiskal diukur dengan saham lokal dari pengeluaran terhadap total pengeluaran pemerintah. Desentralisasi fiskal mungkin dapat berpengaruh dengan pertumbuhan apabila terdapat kenaikan efisiensi yang tepat pada penyediaan barang – barang publik dengan mempertimbangkan preferensi lokal, pengurangan biaya dan perbaikan produktivitas pada efisiensi pihak produsen. Nilai ratio koefisien Gini Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada umumnya memiliki nilai yang kecil, tetapi pemerataan pendapatan belum sepenuhnya tercapai.

KAJIAN TEORI

Kerangka Teori

Dasar teori yang digunakan dalam penelitian mengenai Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan wilayah adalah teori pembangunan ekonomi, teori publik, teori pertumbuhan ekonomi serta teori mengenai ketimpangan.

Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan

Secara umum perokonomian akan mengalami pertumbuhan secara natural dari waktu ke waktu, dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terjadi lebih cepat dan lebih besar dibandingkan secara natural karena kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan dalam efisiensi pada sektor publik. Pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal mempunyai hubungan secara bersamaan karena adanya beberapa penyebab yaitu pertumbuhan terlihat obyek dari desentralisasi fiskal yaitu efisiensi alokasi sumber daya pada sektor publik, kemudian secara tegas tujuan dari pemerintah dalam mengadopsi kebijakan ini adalah untuk menunjang kenaikan pendapatan perkapita dan yang terakhir pendapatan perkapita merupakan suatu ukuran yang lebih mudah dan dapat menjelaskan keadaan ekonomi dibandingkan dengan indikator yang lain (Zhang dan Zou , 2001)

Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan

Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah untuk mengurus dan mengatur segala kewenangan yang berada di daerah nya masing – masing, Desentralisasi mempunyai tujuan agar pemerintah daerah dalam mengelola daerah akan lebih efisien khususnya pada sektor publik, dan hal tersebut akan menunjang terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Kebijakan yang dilakukan daerah dengan mempertimbangkan kondisi daerah, kekayaan SDA di daerah serta SDM yang berada di daerah diharapkan akan mempercepat proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Dalam proses sentralistik terdahulu pemerintah pusat mempunyai kewenangan yang besar terhadap kebijakan – kebijakan

yang diberikan kepada tiap – tiap daerah, sehingga kebijakan yang diberikan terkadang tidak sesuai dan tidak tepat sasaran , hal ini dikarenakan pemerintah pusat belum sepenuhnya memahami keadaan yang sebenarnya pada tiap – tiap daerah munculnya ketidakadilan porsi dana yang diberikan oleh pusat tidak merata , daerah yang kaya diberikan banyak porsi dan justru terbalik daerah miskin hanya memiliki porsi yang sedikit dan hal ini akan menimbulkan adanya ketimpangan daerah .

Menurut penelitian yang dilakukan Akai dan Sakata (2005), desentralisasi fiskal merupakan sebagai alat yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Akai dan Sakata (2005) menjelaskan pada sistem sentralistik pelaksanaan untuk mendistribusikan sumber daya daerah yang kaya ke daerah yang miskin dan dapat mengurangi kesenjangan, tetapi pada sistem otonomi daerah bukan berarti dampak kesenjangan sosial lebih besar dibanding sistem sentralistik, dalam sistem otonomi diharapkan daerah akan lebih intensif untuk memajukan daerahnya dengan melakukan kebijakan – kebijakan untuk pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan dengan Ketimpangan

Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang selalu ada dalam proses pembangunan pada setiap daerah, apabila suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi akan mempunyai dampak negatif adanya ketimpangan pendapatan. Menurut Dr.Thee Kian Wie dalam pengamatan dan penelitian di berbagai negara pertumbuhan perekonomian di suatu negara yang pesat juga terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi apabila permasalahan kemiskinan dan pengangguran belum teratasi sepenuhnya. Para ekonom pembangunan Adam Smith, David Richardo, Karl Marx hingga Kuznets menyatakan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang tidak merata. Arthur Lewis mengatakan pertumbuhan ekonomi adalah merupakan proses yang tidak menyeluruh tidak seimbang. Di keadaan yang sebenarnya dari berbagai negara berkembang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat akan terjadi juga ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi. Menurut Gustav Ranis (1977) *trade off pessimism* menyatakan bahwa sebagian besar kenyataan empiris yang ada, baik data *cross section data* dan data *time series data* menunjukkan suatu pertentangan antara keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah berjalan sejak tahun 2001 melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 yang mengatur tentang perimbangan wewenang dan perimbangan otoritas keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004.

Indikator desentralisasi fiskal merupakan variabel penelitian dalam dimensi ekonomi yang diambil dari sisi penerimaan pemerintah, hal tersebut merupakan asumsi menurut teori Peacock dan Wisemen serta teori Wagner sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sisi penerimaan pemerintah memiliki nilai nominal yang lebih valid yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi diambil sesuai dengan penelitian Jing Jin dan Heng-fu Zou tahun 2000 serta penelitian Philip Bodman dan Kathryn Ford (2006), Teori Harrod Domar juga sesuai dengan variabel pertumbuhan ekonomi. Variabel Ketimpangan pendapatan sesuai dengan penelitian Kristin J. Forbes tahun 2000, dalam variabel ini menggunakan penghitungan nilai koefisien gini tiap kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Variabel derajat desentralisasi fiskal , pajak daerah , jumlah tenaga kerja dan populasi di tentukan dari penelitian – penelitian terdahulu. Perumusan Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertumbuhan Ekonomi:

1. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang negatif dan signifikan antara pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara populasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketimpangan Wilayah:

1. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi daerah terhadap ketimpangan wilayah.
2. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang negatif dan signifikan antara derajat desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah.
3. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang negatif dan signifikan antara pajak daerah terhadap ketimpangan wilayah.
4. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara populasi terhadap ketimpangan wilayah.
5. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara tenaga kerja terhadap ketimpangan wilayah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan jenis campuran antara data kuantitatif yang kemudian di jelaskan atau diartikan dalam bentuk deskriptif pada data yang ada. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dari sumber – sumber data yang terkait yang menggunakan data panel.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB per kapita tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar ataukah lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak. Laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator perkembangan PDRB per kapita dari tahun ke tahun dengan satuan variabel dalam persen. Ketimpangan Pendapatan adalah Ketimpangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah/wilayah pada waktu/kurun waktu tertentu. Ketimpangan Pendapatan diukur menggunakan Gini Ratio . Gini ratio adalah hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran rasio gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai nilai antara 0 sampai dengan 1.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber fiskal daerah , dalam penelitian ini pajak daerah ditunjukkan dengan rasio pajak daerah terhadap PDRB pada masing – masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan satuan variabel dalam persen. Desentralisasi Fiskal dengan pengukuran derajat desentralisasi fiskal dimana merupakan besaran dari bagian Pendapatan Asli Daerah dari semua total pendapatan daerah yang diterima. Satuan dari variabel desentralisasi fiskal adalah persen. Penduduk usia kerja menurut BPS didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas, dan dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja angkatan kerja merupakan tenaga kerja adalah orang yang telah bekerja termasuk dalam umur angkatan kerja yang mempunyai penghasilan.

Tenaga Kerja merupakan penduduk berumur 15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Selama Seminggu bekerja untuk menghasilkan output barang dan jasa yang Lalu di Jawa Tengah. Satuan dalam variabel tenaga kerja adalah jiwa. BPS mendefinisikan bahwa yang dimaksud penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan untuk menetap (dalam satuan jiwa). Besaran penduduk di suatu wilayah tertentu merupakan modal untuk menentukan hasil suatu keluaran atau output yang terangkum dalam PDRB daerah walaupun penduduk terhadap PDRB tidak mempunyai hubu

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS (*Ordinary Least Square*) data panel. Model analisis regresi menggunakan regresi biasa. Dalam persamaan yang ada akan terbentuk analisis regresi dalam model ekonometrika sebagai berikut.

$$YEG = \alpha_0 + \alpha_1 DFit + \alpha_2 Tx + \alpha_3 Pop + \alpha_4 TK + \varepsilon$$

$= \beta_0 + \beta_1 YEG + \beta_2 DF + \beta_3 Tx + \beta_4 Pop + \beta_5 TK + \varepsilon$ Dimana : EG = Pertumbuhan Ekonomi

DF = Desentralisasi Fiskal

Tx = Pajak Daerah

Pop =Pertumbuhan populasi atau jumlah penduduk

TK = Tenaga Kerja

KT = Ketimpangan Pendapatan

Deteksi penyimpangan asumsi klasik menggunakan deteksi multikolinearitas , deteksi heteroskedastisitas, deteksi otokorelasi dan uji normalitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengkaji dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, menggunakan data panel dan metode regresi OLS. Fokus utama adalah bagaimana kebijakan desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Temuan utama penelitian ini meliputi:

1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi:

Tabel 1

Uji Signifikansi F pada model regresi EG

<u>probb F – Statistik</u>	<u>Alpha</u>
0,0000	0,05 atau 5 %

Dari Tabel 1 menunjukkan nilai Prob(F – Statistik) dalam hasil regresi sebesar 0,0000 dan alpha 0,05 atau 5 persen , nilai Prob(F- Statistik) < 0,05 berarti H0 diterima atau hasil signifikan terhadap probabilitasnya.

Tabel 2

Uji Signifikansi F pada model regresi EG

<u>F- statistic</u>	<u>F Tabel</u>
6,467884	2,26

Dari Tabel 2 menunjukkan nilai Prob(F – Statistik) dalam hasil regresi sebesar 0,0000 dan alpha 0,05 atau 5 persen , nilai Prob(F- Statistik) < 0,05 berarti H0 diterima atau hasil signifikan terhadap probabilitasnya.

Nilai Prob(F – Statistik) dalam hasil regresi sebesar 0,0000 dan alpha 0,05 atau 5 persen , nilai Prob(F- Statistik) < 0,05 berarti H0 diterima atau hasil signifikan terhadap probabilitasnya.

Tabel 3
Uji Signifikansi t ($\alpha = 0,05$) Persamaan Pertumbuhan Ekonomi (EG)

Analisis Variabel	t-Statistik	t-Tabel	Probabilitas	$\alpha = 0,05$	Hasil
DF	2.609070	1,645	0.0101	0,05	Signifikan
TX	-1.123776	1,645	0.2631	0,05	Tidak Signifikan
POP	-10.39694	1,645	0.0000	0,05	Signifikan
TK	3.683546	1,645	0.0003	0,05	Signifikan

Dari Tabel dapat dianalisis bahwa nilai Probabilitas t-statistik kurang dari nilai alpha 0,05 berarti signifikan atau H0 diterima , variabel DF POP TK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen EG (Pertumbuhan), sedangkan variabel TX nilai probabilitas t- statistik lebih dari 0,05 H0 ditolak berarti tidak signifikan. Pajak Daerah (TX) mempunyai hasil tidak signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi, tujuan awal pajak daerah adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga pajak akan mengurangi pertumbuhan ekonomi .

- Desentralisasi fiskal memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan derajat desentralisasi fiskal sebesar 1% mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,103%.
- Indikasi ini menunjukkan bahwa alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk sektor publik memberikan dampak nyata dalam mendukung pengembangan wilayah, terutama jika dana tersebut diarahkan pada sektor produktif seperti infrastruktur dan layanan dasar.

2. Pajak Daerah sebagai Faktor Penghambat:

Pajak daerah memiliki pengaruh negatif, meskipun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pajak yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan investasi, sehingga melemahkan pertumbuhan. Namun, pajak tetap menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, sehingga perlu dikelola secara bijak.

3. Pengaruh Populasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi:

- Populasi yang besar memiliki dampak negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan penurunan sebesar 0,48% untuk setiap kenaikan populasi sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk tanpa disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi beban bagi perekonomian daerah.
- Sebaliknya, tenaga kerja memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap peningkatan tenaga kerja sebesar 1% mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 2,96%. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam mendorong kemajuan ekonomi.

4. Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan:

Hubungan desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan merupakan persamaan kedua dalam penelitian ini. Persamaan ketimpangan pendapatan (KT) yang menjelaskan hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan. Dalam regresi model Ketimpangan Pendapatan nilai R^2 sebesar 0,565276 atau 56% yang berarti variabel dependen KT mampu dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 56,52%.

Tabel 4
Uji Signifikansi F pada model regresi EG

probb F – Statistik	Alpha
0,000000	0,05 atau 5 %

Dari Tabel 4.20 diatas menunjukkan nilai Prob(F – Statistik) dalam hasil regresi sebesar 0,0000 dan alpha 0,05 atau 5 persen, nilai Prob(F- Statistik) < 0,05 berarti H_0 diterima atau hasil signifikan atau secara keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen mempunyai pengaruh signifikan.

Tabel 5
Uji Signifikansi t ($\alpha = 0,05$) Persamaan Ketimpangan Pendapatan (KT)

Analisis Variabel	t-Statistik	t-Tabel	Probabilitas	$\alpha = 0,05$	Hasil
EG	-0,481453	1,645	0,6310	0,05	Tidak Signifikan
DF	0,695629	1,645	0,4879	0,05	Tidak Signifikan
TX	-2,447979	1,645	0,0156	0,05	Signifikan
POP	-1,457271	1,645	0,1474	0,05	Tidak Signifikan
TK	-3,13E-07	1,645	0,0016	0,05	Signifikan

Dari Tabel 5 dapat dianalisis bahwa nilai Probabilitas t-statistik kurang dari nilai alpha 0,05 berarti signifikan atau H_0 diterima, variabel TX dan TK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen KT (Ketimpangan Pendapatan). Variabel EG , DF dan POP mempunyai pengaruh tidak signifikan.

- Desentralisasi fiskal menunjukkan hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, alokasi fiskal daerah masih belum mampu secara efektif mengurangi kesenjangan antarwilayah.
- Variabel pajak daerah dan tenaga kerja berpengaruh signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Sementara itu, variabel populasi memiliki hubungan negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan, menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan pertumbuhan penduduk agar tidak memperburuk disparitas ekonomi.

Pembahasan

Hasil penelitian ini memberikan gambaran menarik mengenai implementasi desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal terbukti menjadi instrumen yang efektif, terutama dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan PAD. Namun, efektivitas desentralisasi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan masih memerlukan perhatian serius. Ketergantungan pada PAD sering kali membuat daerah kaya mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan daerah miskin, yang lebih bergantung pada transfer pusat. Fenomena ini mencerminkan teori Kuznets

yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan. Pada tahap berikutnya, seiring dengan perbaikan infrastruktur, penguatan kebijakan redistribusi, dan peningkatan kualitas SDM, ketimpangan diharapkan akan menurun. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan alokasi anggaran yang lebih adil dan berbasis kebutuhan masyarakat, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

Temuan negatif pada populasi sebagai faktor penghambat pertumbuhan ekonomi juga patut menjadi perhatian. Penduduk yang besar tanpa disertai pendidikan dan keterampilan yang memadai dapat menjadi beban sosial-ekonomi. Hal ini membutuhkan program pemerintah yang proaktif dalam peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan penyediaan lapangan kerja produktif. Hasil yang menarik juga ditemukan pada peran tenaga kerja. Dengan pengaruh positif signifikan, tenaga kerja menjadi modal utama untuk pertumbuhan ekonomi, terutama jika didukung oleh kebijakan yang mendorong investasi dan inovasi. Pajak daerah, meskipun dianggap negatif terhadap pertumbuhan, tetap menjadi instrumen penting dalam mendanai program redistribusi yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan, seperti subsidi pendidikan dan kesehatan.

KESIMPULAN

Pengaruh Desentralisasi fiskal di provinsi Jawa Tengah terhadap pertumbuhan berpengaruh secara signifikan dan positif. Jadi desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Estimasi model regresi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap desentralisasi fiskal dan tenaga kerja. Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang semakin besar juga, hal tersebut dipengaruhi adanya nilai PAD yang semakin besar terhadap total penerimaan daerah. Sedangkan peningkatan tenaga kerja akan menambahkan output dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Model regresi pertumbuhan ekonomi yang mempunyai sifat hubungan yang negatif adalah tingkat pajak daerah dan populasi, Apabila pajak daerah semakin tinggi maka justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi, Pertambahan jumlah populasi akan juga mengurangi nilai pertumbuhan ekonomi, dikarenakan apabila jumlah populasi dengan kualitas SDM yang rendah justru akan menghambat pertumbuhan karena akan semakin banyak permasalahan yang muncul.

Pengaruh desentralisasi Fiskal terhadap ketimpangan pendapatan mempunyai hubungan yang positif dan tidak signifikan. Estimasi model regresi ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Tengah yang berpengaruh secara tidak signifikan dan negatif adalah pertumbuhan ekonomi, populasi. Sedangkan pajak daerah dan tenaga kerja secara signifikan dan negatif mempengaruhi ketimpangan. Pajak daerah dan tenaga kerja terbukti dapat mengurangi adanya ketimpangan pendapatan, yang terjadi di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah. Pajak daerah merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengurangi ketimpangan. Tenaga kerja dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, karena semakin bertambahnya tenaga kerja yang produktif pemerataan pendapatan akan tercapai.

SARAN

Penanganan mengenai kebijakan Ketenagakerjaan oleh seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah merupakan prioritas dalam rangka kebijakan daerah, Penciptaan tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan ketimpangan pendapatan. Dalam rangka kebijakan daerah, yang akan diprioritaskan selanjutnya adalah mengenai pengelolaan kebijakan secara tepat mengenai derajat desentralisasi

fiskal yaitu Pendapat Asli Daerah Terhadap Total Penerimaan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Prioritas kebijakan daerah yang ketiga adalah mengenai penanganan Masalah kependudukan atau jumlah penduduk oleh pemerintah Kabupaten Jawa Tengah, Kualitas pendudukan atau SDM juga akan berpengaruh terhadap kualitas dalam proses pembangunan daerah. Dengan adanya wajib belajar serta adanya program khusus pemerintah untuk mengasah keterampilan penduduk. Prioritas yang keempat dalam rangka kebijakan daerah tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan memaksimalkan pengelolaan terhadap pajak Daerah dan pemerataan daerah bekerja secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. “ *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali.*” Jurnal Interdisipliner Kritis UKSW. Diakses tanggal 1 Oktober 2011, dari <http://priyohari.files.wordpress.com>
- Adisubrata, Winarna Surya. 2002. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Akai, Nabuo and Masayo Sakata . 2005 .” *Fiscal Decentralization , Commitment and Regional Inequality: Evidence from State-Level Cross-sectional Data for the United States.* “ CIRJE-F-315. <http://www.e.u-tokyo.ac.jp/cirje/research/03research02dp.html>
- Badan Pusat Statistik 2010 , *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah 2010*, Semarang : BPS Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik, 2011 , *Jawa Tengah dalam angka 2011*, Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik, 2008 , *Jawa Tengah dalam Angka 2008* , Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Barnadi , Devri, Suryadi S., dan W. Hardani (Eds). 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Bodman, Philip and Kathryn. 2006. “*Fiscal Decentralisation and Economic Growth in the OECD*”. Macroeconomics Research Group. <http://www.uq.edu.au/> Diakses tanggal 9 Maret 2012.
- Boediono . 2008 . *Seri synopsis Pengantar Ilmu Ekonomi , Ekonomi Makro* . Yogyakarta : BPFE.
- CAI, Fang dkk . 2002 .” *Regional disparity and economic growth in China The impact of labor market distortions.*” China Economic Review dari search.proquest.com.
- Forbes, Kristin J. 2000. “ *A Reassessment of the Relationship Between* [http://eprints.undip.ac.id/16947/1/Analisis_Dampak_Desentralisasi_Fiskal_Terhadap....by_H](http://eprints.undip.ac.id/16947/1/Analisis_Dampak_Desentralisasi_Fiskal_Terhadap....by_Hadi_Sasana_(OK).pdf) [di_Sasana_\(OK\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/16947/1/Analisis_Dampak_Desentralisasi_Fiskal_Terhadap....by_Hadi_Sasana_(OK).pdf) *Inequality and Growth.*” The American Economic Review VOL.90 No.4 dari <http://web.mit.edu/kjforbes/www/Papers/Inequality-Growth-AER.pdf>
- Sasana, Hadi. “ *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.*” *Dinamika Pembangunan*, Vol.3, h. 145 – 170. Diakses tanggal 26 November 2011.